

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Percakapan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dan KPU, Bawaslu, DKPP serta Mendagri tentang daerah pemilihan

KPU : Tahapan Pemilu 2024 yang sedang dilaksanakan di tahun 2022 ini adalah. Pertama, penataan dan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten/kota. Saya kira kita maklumi semua bahwa sesungguhnya di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 kewenangan KPU diberikan untuk menyusun dan menata daerah pemilihan DPRD Kabupaten/kota saja. Tetapi dalam perkembangannya ada putusan mahkamah konstitusi nomor 80 yang kemudian memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusun dan menata daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi yang itu di dalam undang-undang Nomor 7 adalah wewenang pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, nanti dibagian ini juga apa secara spesifik akan ada pembicaraan khusus tentang penataan dapil DPR RI dan DPRD Provinsi, eh apa namanya, dalam waktu yang tidak terlalu lama karena waktu karena target-targetnya dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan harus sudah ada penetapan daerah pemilihan pada 9 Februari 2023.

Untuk penataan dan penyuaunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota nanti secara khusus kita bicarakan tetapi secara gambaran umum kurang lebih perlu kami sampaikan bahwa didalam amar putusan MK disebutkan akan diatur dalam PKPU sehingga mekanisme pembentukan KPU akan kami tempuh sebagaimana amanat uu no 7

Tahun 2017 yang itu harus kami sampaikan pada rapat konsultasi, rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah.

Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang daerah pemilihan tadi maka kemudian langkah-langkah yang dilakukan di internal KPU pusat melakukan kajian dengan para ahli daerah pemilihan untuk membuat simulasi-simulasi daerah pemilihan untuk DPR RI dan kemudian KPU Provinsi juga melakukan hal yang sama, beberapa waktu yang lalu sudah melakukan persentasi daerah pemilihan DPRD Provinsi dan kemudian dalam waktu dekat teman-teman KPU Provinsi akan melakukan uji publik usulan atau simulasi dapil dprd provinsi di provinsi nya masing-masing user nya untuk pemilu dprd provinsi. Nah untuk di pusat, setelah kami bicarakan dengan Komisi II dan Pemerintah nanti baru kita lakukan uji publik supaya kemudian ada catatan dan masukan. Kurang lebih itu untuk tahapan kegiatan penyusunan dan penataan dapil karena nanti akan jadi PKPU tentu saja sekiranya konsep sudah matang nanti akan kami ajukan secara tersendiri dalam rangka untuk rapat konsultasi, RDP untuk PKPU penyusunan penataan dapil dpr ri provinsi kabupaten kota.

Mendagri : Kami mohon izin pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang kami mulyakan menyampaikan dinamika yang terkait dampak gugatan di MK. Yang pertama putusan MK Nomor 80 Tahun 2022 Tanggal 30 November yaitu masalah dapil. Daerah Pemilihan dan jumlah kursi setiap dapil diatur dalam PKPU. Daerah pemilihan dan jumlah kursi dprd provinsi diatur dalam PKPU Kemudian ada lampiran 3 nya dapil dan alokasi jumlah kursi DPR RI dan juga ada lampiran 4 dapil dan alokasi kursi dprd provinsi uu no 7 tahun 2017 tentang

pemilu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam proses penyusunan PKPU dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat ini putusannya. Nah dampak dari putusan ini perlu ada kesiapan KPU dalam penyusunan dapil dan kursi. KPU perlu menyiapkan PKPU tentang penetapan dapil tadi dan alokasi jumlah kursi dengan memperhatikan ketersediaan waktu yang ada. Kemudian pelibatan DPR Ri dan pemerintah dalam penyusunan dapil dan alokasi jumlah kursi. Ini amanat ini. Dan juga uji publik dan tanggapan masyarakat terhadap rancangan dapil dan alokasi kursi dan yang terakhir perlu mengantisipasi potensi kerawanan dinamika politik akibat dari penataan dapil dan alokasi jumlah kursi baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Terakhir mohon izin sebagai saran dan masukan pertama pemerintah dan DPR menghormati dan patuh terhadap putusan mahkamah konstitusi sebagai dampak putusan MK Nomor 80 Tanggal 30 November Tahun 2022 ini masalah penataan dapil pemerintah menyarankan agar KPU mengundang pemerintah dan DPR guna membahas secara lebih mendalam terhadap usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi mungkin melalui mekanisme pelaksanaan konsinyering sehingga ada kesepakatan bukan dalam arti konspirasi tapi kesepakatan yang kita lakukan.

Ketua Komisi II : Soal dapil, kami sudah rapat internal, ya kami sudah rapat internal, berusan juga syaa udah komunikasi dengan pa junimart yang kemaren rapat internal temen temen tidak hadir karena hadir di acara hut, kami sudah sepakati bahwa untuk dapil dpr ri dan dprd provinsi sikap kami adalah tidak ada

perubahan sama dengan lampiran undang-undang nomor 7 Tahun 2017. Jadi walaupun nanti didorong untuk melakukan konsinyering. Itu seperti konsinyering biasa karena memang kewenangan perubahan dapil tingkat kab/kota ada di KPU RI. Jadi itu saya perlu sampaikan mewakili temen-temen yang sudah mengambil keputusan kemaren dan silakan nanti kita bahas. Kira-kira begitu.

Pak Junimart : Begini pak Hasyim dan para komisioner. Tadi Pak Menteri juga telah menyampaikan tentang putusan MK Nomor 80. Kalau saya melihat putusan ini pak, ya. Nggak ada perintah. Gada perintah, pak. Saya sudah bolak balik putusannya nomor 80 itu pak gada perintah supaya KPU melakukan penataan dapil yang diberikan kewenangan pak bukan perintah, Kita mesti fahami semua ini pak jadi jangan KPU bikin kerja-kerja baru pak. Tadikan disebutkan diawal tadi pak Hasyim menyebutkan bahwa pada tahun 2022 diajukan 8T sekian-sekian, begitu pak ya? Tetapi disetujui dalam DIPA 3,5T lebih. 2023 saya caca nih pak diajukan 23 T 800 sekian M sekian sekian disetujui 15 sekian sekian. Kalau bapak kegenitan nambah dapil pak. Ini aja gabisa pak jadi jangan bikin persoalan baru. Putusan MK 80 itu pak tidak memerintahkan pak. Coba dibaca pak coba dibaca jadi tidak setiap putusan itu harus dilakukan bisa iya bisa tidak kecuali diperintahkan pak coba dibuka lagi pak putusannya ya kan ya itu kan Cuma disebutkan pasal 187 ayat 5 189 ayat 5 sepanjang, norma nya itu kan sepanjang menyangkut dapil pak tidak diperintahkan KPU harus menata dapil pak Ini pak tolong pak jangan bikin kerja kerja baru pikirkan anggaran bapak anggarkan 100 disetujui dipa 50 mau jadi masalah ini pak? Karena periode lalu saya menjadi bagian dari pimpinan pansus untuk pemilu pak, dapil ini menjadi masalah pak

kemaren pak gajadi dirobah. Ini pak Hasyim dan pa Menteri putusan MK 80 tidak ada perintah hanya amarnya 3 poin. Pasal 187 ayat 5 189 ayat 5 itu pak ketentuan norma. Tidak menetapkan agar KPU menata dapil, gaada pak mengatur kursi gaada pak. Ini pak Hasyim Pak Menteri lebih paham lah beliau kan guru saya di ilmu hukum juga tapi untuk proses penyidikan dan penindakan gitu pak tapi kalau di pengadilan saya lebih faham dari beliau dulu. Gitu pak. Iya. Itu semua kita fahami pak forum ini termasuk rekan rekan pers. Putusan MK 80 tidak ada memerintahkan pak tetapi memberikan kewenangan kalau tadi pak ketua mengatakan tidak setuju ya tidak setuju lah gaada perintah kok gitu pak pak Hasyim jadi jangan bikin kerja kerja baru pak pusing bahwa nanti pak anggaran ora ono gituloh pak yak an ini aja diajukan sekian Cuma sekian sekian bagaimana mau kerja pak kita juga komisi II kencang mendesak pemerintah tapi pemerintah bilang begini aja pak Kalau istilah di Kalimantan Utara, Tanghodong hepeng.gitu pak. Tolong pak dipikirkan. Ya ini bapak udah ini. Saya tadi bilang ke pa ketua wah KPU sudah mulai genit lagi nih yakan langkah langkah yang ditempuh KPU untuk memenuhi putusan MK menunjuk tim ahli darimana uangnya pak ini pak ya kan ada nama satu dua tiga empat professor dari mana uangnya pak ini kan bikin kerjaan baru akan melakukan kajian ilmiah akan mengajukan uji publik dairmana uangnya pak iyakan nah itu pak belum pernah dianggarkan . Dianggarkan saja gaada uangnya pak. Ini pak ini saya bolak balik. Saya bilang pak ketua ini gimana pak ketua. Beliau bilang udah bang aja bicara lah begitu. Ya kan. Penataan Dapil anggota DPR. Ini ada tujuh metode alokasi kursi setiap provinsi ya kuota laundes, kuota hawyour, tipistor adam, tipistor apaini pak, hill huntington, wastern, uang

nya pak gitu loh. Ini pak Hasyim dan teman-teman komisioner yang sangat luar biasa tolong lah kolektif juga di dalam menentukan pak ya saya tidak bilang tidak kolektif disana pak ya ini sekjennya pusing pak. Saya lihat di ig ignya itu, ig kpu itu dari papua pak dari mana pak ngurusin ngurusin pak dari mana uang nya pak kan gaada uangnya untuk ke papua bikin kantor papua barat segala macam dari mana uangnya pak ya kan ini masuk sini yang kesini mikir dari sini pak a ini dulu pak konsentrasi aja ndak usah bapak mikirkan apa namanya penataan dapil. Gaada perintah MK Nomor 80 itu pak hanya memberikan kewenangan yak an pak kecuali perintah ada juga perintah yang salah pak perintah suruh tembak, tembak pak. Iya kan walaupun illegal tapi kena komandan tembak juga sekarang menyesal misalkan ah ini pa Hasyim dan kawan-kawan komisioner ya kan kan bapak udah pengalaman semua sudah di provinsi sudah di kabupaten kota pak tolonglah gausah ini pak sudah menunjuk tim-tim segala maca mini ndak usah bentuk tim kita-kita aja pak diskusi. Kami kan punya dapil masing-masing nih, bapak tinggal tanya ini pak Saan Mustofa ini perlu ga dapilnya dimekarkan misalnya loh kan gitu pak sederhana pak, ndak perlu uji publik, saya bilang gamau saya saya udah bolak balik turun kok masa bapak mekarkan mampus saya pak lah kan begitu pak saya bolak balik kasih sembako iya kan, karena komisi II itu tugasnya sertifikasi, iya kan bagi-bagi KTP kan gitu, bapak mekarkan, mampus saya pak gituloh itu dari segi kepentingan para anggota sendiri tapi dari segi anggaran bapak coba lah rasional berpikir ya kan dari segi kemampuan untuk memahami putusan itu ndak ada perintah pak, saya belum pernah berbicara ini ya pak, baru ini saya baru bicara ini pak, ndak ada perintah itu udahlah ndak usahlah

bicara dapil pak ndak usah ada oenataan, kerja kerja saja pak bapak konsen di apa namanya proses putusan MK apakah sistim proporsional terbuka atau tertutup. Kalau dapil tadi kan seperti kata ketua pergunakan saja lampiran dalam undang-undang nomor 7 2017 itu pak itu saja pergunakan ndak usah nambah-nambah.

Ketua Komisi II : Soal dapil itu kalau kita bahas sekarang, energi nya terlalu besar termasuk tadi soal anggaran dan macam-macam, saya bahas dapil aja nih berapa halaman nih, bahas satu halaman aja mungkin butuh berapa bulan yah, metode nya ini apa segala maca mini, jadi energinya besar. Catatan saya dari pa Junimart jangan nambah kerjaan baru, gitu pake yang ada aja.

Pak Saan Mustopa : tentu tadi seperti pa junimart sampaikan dapil memang secara pribadi saya pun menyadari banyak juga pembentukan pembentukan dapil itu ya misalnya yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip pembentukan sebuah dapil, saya selalu mencontohkan misalnya di jawa barat. Ada dapil jawa barat 3 cianjur sama kota bogor dari sisi pembentukan dapil dimana prinsipnya secara geografis kalau ke cianjur dari kota bogor lewat puncak ngelewatin kabupaten lewat sana ngelewatin sukabumi dari mana ininya dari sisi prinsip nya, dari sisi representasi proporsional jawa barat dengan jumlah penduduk besar alokasi kursi cuman 91 yang seharusnya lebih dari 100 ae hingga kursi di dapil sana menjadi sangat mahal karena alokasi pembandingnya itu besar sekali bisa diatas 400ribuan satu kursi kalau misalnya dibandingkan dengan tempat lain itu jauh sekali kalau misalnya kita mengacu kepada hal-hal seperti itu tapi ini kan pemilu udah dekat partai udah menyiapkan dan sebagainya maka dengan segala kalau misalnya mau kita tata nanti udahlah begitu selesai pemilu mari kita berkomitmen untuk

membenahi ini semua dulu kita punya semangat untuk membenahi ini semua maka diawal periode DPR kita ajukan yang namanya revisi undang-undang pemilu diawal supaya ada waktu untuk sosialisasi ada waktu untuk diuji materi tetap nah sekarang kalau misalnya kita mengalami kejadian menjelang pemilu 2009 april mau dilaksanakan pemilu tiba tiba akhir desember uji materi udah diputuskan partai udah menyiapkan semua dengan sistim proporsional bahkan waktu itu semi terbuka waktu itu repot semua nah karena kita menyadari tapi karena udah mepet udahlah kita tetap gunakan yan adad ulu aja misalnya dapil gaperlu juga misalnya tadi saya sepakat gaperlu juga diutak atik dulu deh untuk dpr ri dan provinsi udah gunakan yang ada karena di undang-undangnya nih misalnya ketika misalnya ngambil contoh metode konversi suara misalnya konversi suara kan diuu udah dijelaskan ndak ada lagi pilihan terkait dengan konversi suara uu kan memutuskan konversi suara kita memutuskan konversi suara kita saint lauge misalnya jadi saya hanya ingin walaupun kita menyadari bahwa banyak dapil dapil yang dibentuk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan dapil geografis, budaya dan sebagainya terus juga soal representasi profesionalnya keadilan ya keadilan proporsionalnya dulu kalau bisa kita gugat banyak juga misalnya ketika Sulawesi Selatan mekar menjadi Sulawesi barat engga berkurang provinsi induknya ada juga dulu misalnya dan sebagainya tapi kan gak kita utak atik juga jadi terkait dengan dapil kalau misalnya kita dikomisi II udah kita gunakan untuk ri dan provinsi tetap menggunakan dapil yang lama.

Ketua Komisi II : Jadi per 16 juni sudah kick off 14 juni sudah kick off semua pemain sudah masuk lapangan sudah dikasih nomor punggung lagi main bola

sekarang tiba-tiba aturan diubah off side gaada misalnya atau penonton suruh pulang semua malahan sudah beli tiket nah ini maksudnya ini harus sampai pesan ini jadi sekarang semua udah main kalau mau ubah aturan sebelum kick off atau sesudah permainan kita kaji ulang aturannya gitu itu yang paling fair jangan orang lagi main nendang bola buat aturan baru ya kan yang disebut goal itu kalau bolanya sampe di tribun misalnya kan kacau gitu, itulah maksudnya kami bukan tidak mau bukan menyebutkan aturan sekarang ini paling sempurna tidak itu kenapa makanya komisi II dari awal ingin merevisi undang-undang karena memang banyak yang harus disempurnakan tapi penyempurnaan nya itu tidak melalui satu pasal saja atau dua pasal saja kami juga kaget kemaren tiba-tiba gapernah ada yang tau gapernah dilibatkan sebagai pembuat uu tiba tiba penetapan dapil yang tadinya hak dpr dikasih kpu tanpa diberi tau ditengah-tengah sedang maen bola gitu ini yang menurut kita ga fair gitu ya nah jadi mudah-mudahan mahkamah konstitusi mempertimbangkan itu

Pak Yanuar : Izin saya menyampaikan bahwa jika ini satu perjalanan pesawat, ini pesawat ini udah mulai jalan. Kita sudah putuskan kemarin titik nol kilomernya dan kita sudah putuskan juga di mana pesawat akan mendarat. Kira kira begitu. Tapi ketika pesawat sudah mau take off, Ini para penumpang mulai bertanya tanya, Ini nanti di atas ketinggian ribuan kaki ini masih aman kah ini cuaca di atas? Kenapa harus begitu? Karena ketika mau take off ini goncangan terlalu keras pak. Kita aja kalau naik pesawat ketika baru take off itu goncangannya keras itu kita mulai mikir ini gimana kira kira kode 1000? Apa ribuan kaki di atas? Lihat cuaca atau ada pengumuman masuk dari luar. Pak ini kenapa saya harus

menyampaikan ilustrasi yang semacam ini supaya. Keadaan psikologi kenyamanan tingkat trust tingkat koordinasi manajemennya itu tidak terganggu. Saya justru khawatir ini, jangan jangan ketika guncangan itu terjadi pada saat mau take off itu keadaan di dalam cerai berai pak. Orang mulai mikir untuk mencari keselamatan masing masing masing. Itu yang kita sebut dengan ada upaya dari guncangan itu yang membuat seluruh yang ada di dalam kemudian tercerai berai. Internal di dalam masing masing. Akhirnya goyah. Koordinasi Antara apa pilot dengan pramugari menjadi tidak konektif. Penumpang tidak mau lagi ikut aturan aba aba dari pramugari atau dari pilot. Kalau sudah keadaan begini, pesawat kacau. Karena itu bapak ibu yang saya hormati. Keadaan ini harus segera kita kendalikan. Kenapa harus kita kendalikan supaya pesawat mulai nyaman lagi take off nya dan kemudian di ketinggian yang tinggi kita sudah mulai nyaman dan insyaallah mendarat tepat, tepat waktu, sehat, selamat semuanya bapak ibu, apa yang membuat gancang gancang ini menjadi lebih besar? Itu banyak sumbernya. Yang pertama. Proporsional, terbuka dan tertutup itu guncangan pak. Yang kedua. Penataan ulang dapil itu guncangan pak. Ketika penataan dapil kita teruskan diskusinya. Ini saya kasih tahu pak ini sudah perdebatan bukan soal logika lagi bagaimana menata dapil Ini pasti perdebatan kepentingan antar partai politik tak seharusnya fair aja. Kalau mau ditanya ke teman, teman partai juga pasti sama ketika kita ngomong penataan dapil itu bukan logika bagaimana menata tapi lebih bagus yang ada pasti hitung hitung pak. Kalau begini nanti saya rugi kalau begini saya untung itu nanti perdebatannya begitu, kenapa? Karena tiap diskusi dapil itu kalau bikin apa undang undang Pemilu itu mesti di akhir diskusi itu nggak mau ditaruh

di apa di depan. Nah karena kita menyadari ini pesawat lagi ada guncangan. Karena kalau kita kendalikan ya sudah kalau gitu kita pakai pola yang lama subsidi enggak terlalu oleng juga pak kalau pesawatnya oleh repot juga semakin dalam. Ini kita bahas. Khawatir malah pesawat makin makin oleh itu satu pak. Karena itu kami mengusulkan termasuk pb ya sudah kita status quo saja status wa itu artinya kita pakai lampiran undang undang yang lama sebagai cara kita meredam supaya pesawat ini pada saat take off tetap nyaman.

Itu yang pertama yang kedua. Soal dapil terbuka tertutup juga. Ini juga guncangan juga pak. Yang jadi masalah adalah pengendali guncangannya bukan di sini. Ada di ruang yang lain nih, artinya ada di luar pesawat itu ada di menara kontrol. Kan tetap pesawat ketika terbang, itu kan harus dikasih tahu apa menara kontrol rutanya betul rutanya salah belok sekian derajat fraksi derajat itu masalahnya di mana kontrol saya enggak tahu siapa yang bisa memberikan aba aba kepada menara kontrol itu. Kita yang di pesawat biasanya agak susah pak ngasih apa apa ke situ kecuali pilot. Atau orang yang ada di darat mungkin masih bisa kasih konektif Sehingga saya khawatir juga bahwa ini juga menjadi sesuatu yang guncangnya akan makin makin berat. Saya tidak perlu saksikan bagaimana dahsyatnya guncangan dari terbuka ke tertutup guncangan terjadi di internal partai guncangan terjadi juga di lingkungan internal penyelenggara dan seterusnya.

Bapak ibu yang Gongcang berikutnya apa guncangan yang kita lihat meskipun riaknya masih masih apa landai guncangan yang terjadi di internal penyelenggara. Seperti tadi misalnya dari Bawaslu menyampaikan ini soal Tenaga pendukung dari non ASN non PNS ini ada masalah ini kan guncangan juga pak. Sementara aturan

terkait asn itu November mau di cut off sementara ini butuh. Nah ini kalau kita selesaikan juga problem. Belum lagi guncangan tadi di KPU misalnya pada saat verifikasi pendaftaran dan penetapan partai politik. Jadi guncangannya ada di mana mana? Jadi kalau guncang enggak segera kita keluarkan menjadi repot, kita mau take off agak tinggi, kemudian ketika terbang aman, karena itu bapak ibu izin pada kesempatan ini. Saya menyampaikan kalau guncangan guncangan pada saat ekonomi tidak segera kita selesaikan, maka pada saat terbang kita sudah tidak bisa lagi memprediksi keadaannya. Kenapa? Karena pada saat itu badai bisa lebih kencang, badai bisa lebih kuat dan bahkan juga bisa muncul shadow kekuatan kekuatan tersembunyi kemudian justru menjadi sesuatu yang penting pada saat keadaan menjadi apa guncang begitu. Saya kira begitu saja pak pimpinan dari kami usul tetap pesawat yang take off itu harus dikendalikan dengan 3 cara yaitu tadi internal penyelenggara segera dibenahi yang kedua koordinasi tetap harus jalan dan yangberikutnya dapil tetap berada pada keadaan status quo artinya dapil yang lama terimakasih

Pak Syamsurizal : Baru sebentar ini kita sama sama mendengarkan contoh dari pak ketua yakni soal main bola karena kita baru saja selesai yang sikun Piala Dunia dilaksanakan di katar. Jadi sangat pas tadi pak ketua menyampaikan ibaratnya kita sudah kick off tapi ada aturan aturan baru yang keluar. Barangkali ini yang patut kita pandang sebagai sebuah sesuatu yang agak sedikit janggal. Contoh kedua disampaikan oleh pak yang war tadi soal pesawat kita sedang terbang tapi gangguan dari luar atau dari dalam. jJadi yang membuat penerbangan kita jadi agak terganggu sehingga tidak mulus lagi untuk mencapai tujuan kita ke

dari pesawat yang kita tumpangi tersebut. Hal ini disebabkan karena ada hal yang mendadak diungkapkan tadi dari pihak. Tadi dari pihak KPU juga mengakui akan ada usulan perubahan dapil yang didasarkan kepada ketetapan MK nomor 80. Dan pesan itu hanya ditetapkan oleh 10 orang tadi. Dikatakan oleh kawan kawan. MK hanya berisikan 10 orang. Sementara ke tempat kita untuk double ini kita sudah sepakat. Semua akan terlalu repot karena perubahan dapil ini sangat sensitif karena banyak kepentingan kepentingan orang dan partai yang ada di situ. Dan itu hal yang perlu kita ketahui saat ini kita sedang berjalan. Sebagaimana dikatakan oleh pak ketua komisi tadi kita sudah menyusun tim dan segera akan memulai pertandingan dan bahkan tadi katakan kita sudah berada di lapangan. Kita sudah menyusun caleg caleg caleg yang ada di dapil kita. Nah kalau produk anda pilih akan bekerja ulang lagi. Sementara kita tahu persis waktu yang tersisa saat ini hanya tinggal tinggal 13 bulan. Dan itu tidak efektif untuk melakukan tugas karena di dalam itu sudah termasuk masa tenang, termasuk juga kampanye dan di situ juga nanti pemasaran surat suara. Apalagi kpu sudah minta di situ itu dipercepat tentunya akan terkait dengan tugas tugas partai karena ini sangat sensitif sekali berita itu. Kami menyarankan tidak usah lagi bicara soal perubahan perubahan dapil walaupun ada kewenangan di tangan kpu berdasarkan keputusan MK tersebut. Harapan kami tentunya dapil tidak perlu dirubah sesuaikan saja dengan lampiran uu 7 2017 yang lalu

Teddy Setiawan : saya tidak banyak kita sudah sepakat dengan tidak ada revisi undang undang. Walaupun kami awal, kita semua di awal menempati revisi UU Pemilu dan saya memaknai perubahan fundamental terhadap undang undang ini.

Ada perubahan yang sifatnya fundamental ya ini sudah. Bahasa saya qobla ashar ashar tadi pesawat tadi sepak bola udah kobla ashar sebentst lagi mau maghrib lain ceritanya kalau dini hari atau tahajud atau subuhlah kita masih punya tapi sudah di ujung ini sudah ujung, kemudian ada perubahan yang fundamental. Kalau seperti ini nanti ke depan ada perubahan lagi kan susah juga ya, jadi kita ada dalam kondisi yang ketidakjelasan, mungkin juga sama saya harap juga ini jeritan hati, padahal konstitusi ini sudah di ujung ke ujung, kemudian pada hal hal yang kaitannya teknis mungkin masih kita bisa terima hal yang tidak berubah secara fundamental fundamental menyepakati revisi saja kita revisi tapi persoalan lagi. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita selepas Pemilu kita harus revisi sejak awal kita dilantik dpr memang akan lakukan melakukan itu sebetulnya.

Hugua : Selamat sore salam sejahtera sekalian pimpinan dan anggota Mendagri parlemen. KPU Bawaslu BKP dan seluruh komisioner dan berbahagia.

Pertama, saya ingin menegaskan kepada penyelenggara dan pemerintah untuk mencoba menyikapi sebuah apa entertainment pertemuan hari ini. Jadi disamping bobotnya yang tinggi. Tapi ada sebuah entertainment yang mungkin mempunyai nilai kejiwaan yang tinggi maksud yang saya sampaikan pertama kalau kita lihat tadi mulai dari gaya ini januar kemudian kang doli lalu saan kemudian januar kemudian sam tapi sebetulnya. Selama saya jadi anggota komisi 2 baru, saya melihat sebuah pertemuan yang dengan diksi narasi yang sempurna dibawa dengan sebuah nilai kejiwaan dan seni yang tinggi. Artinya kalau kita lihat, maka sebuah ini momentum buat Republik Indonesia. Kita lihat momentum yang harus dari pihak penyelenggara benar benar menyikapi ini secara serius. Ini harus

menyikapi secara serius betapa tadi kick off versi doli kemudian. Pesawat versi januar ini kan sebetulnya kalau kita lihat ilustrasi. Kira kira Senayan ini betapa pentingnya dalam pandangan saya dalam kerangka demokrasi dan kesatuan NKRI dan berbagai aspeknya di mana kalau eksistensi honor Indonesia, keberadaan dan kehormatan di sini menurut saya hal ini mencerminkan betapa keberadaan eksistensi kami dan honor itu menjadi sesuatu yang sedikit. Selama ini penyelenggara. Sebab kalau tidak kalau kita andaikan dengan istilah pilot tadi, tidakkah posisi itu jangan sampai berada di pilot Kemenkeu dalam sebuah pesawat yang universitas bisa saja ditabrak gunung pesawat. Oleh karenanya maka saya minta para penyelenggara dan pemerintah kita lihat ini. Sekali transit ya ini eksistensi negara juga menentukan ini pak oleh karena jangan sampai kerja kerja teknis justru mengganggu psikologi saya lagi kejiwaan hal hal ini karena kalau tidak dicermati pak. Dengan situasi negara ke depan dan berbagai implikasi ini kalau juga ada kegaduhan ke dalam juga bermakna. Oleh karenanya maka pak hasyim pak badja kemudian DKPP pak. Jadi. Ini tolong disikapi secara serius sehingga PKPU nya saya ragu peristiwa lalu kadang kita bicara di sini berbusa busa punya jalan sendiri. Ini tidak boleh terjadi sebab kalau memang ada arogansi penyelenggara PK jalan sendiri, apa yang kita bahas ini tanpa melihat efek dari pada proses ini. Lakukan hal hal ini. Saya tidak tahu kenapa semua yang ada di depan turun bicara ya kan? Eksistensi honor ini sudah menyangkut masalah eksistensial honor kami dalam. Oleh karena itu sekali lagi pesan saya pak tolong jangan mengganggu suasana pemikiran Senayan yang ini akan membawa implikasi pada eksistensi bangsa dan negara itu. Peringatan pertama. Oleh karena

itu, maka oke di sana itu bukan urusan kita lagi. Situ itu aturan, kira kira kontrol lah kita di luar kapasitas kita. Tapi tolong dapil ini selama tidak ada penambahan suara atau jangan ganggu. Karena kalau diganggu juga ya jelas tadi. Tidak ada penambahan. Saya kira kembalilah kepada undang nomor 7 yang kedua.

Pak Riswanto : Untuk KPU kami sudah sepakat bahwa dapil itu tidak perlu dirubah, pak. Jadi mohon juga di apa di hormati keputusan kami ini nanti saran saya pak Ketua juga masuk di dalam Keputusan kita rapat hari ini tentang tidak adanya perubahan dapil untuk DPR RI maupun DPRD Provinsi.

KPU : Yang kedua soal dapil daerah pemilihan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 tahun 2022 cara pandang kami begini pimpinan komisi 2 dan ibu bapak anggota komisi 2 yang kami hormati tentu ada 2 asas penting yang kami perhatikan betul. Yang pertama adalah representatives atau keterwakilan, yang kedua adalah akuntabilitinya. Maksud kami representatif adalah bapak ibu yang sekarang ini duduk di DPR ri, provinsi, Kabupaten kota adalah mewakili suara rakyat pemilih hasil Pemilu 2019.

Dan tentu saja dalam satu periode ini ini kalau melihat dari sisi pemilih ya representatifnya bapak ibu adalah yang mewakili sisi lain. Kalau dari cara pandang para yang terpilih atau duduk menjadi anggota DPR, maka pertanggungjawabannya kepada rakyat pemilih di dapil di mana berasal.

Sehingga kalau kemudian.

Sudah di tengah tengah tahapan Pemilu, lalu kemudian ada perubahan dapil kan jadi problem rakyat pemilih akan bertanya kepada siapa kami akan minta apa?

Katakanlah melapor atau representasi kami. Di sisi lain, ibu bapak sekiranya kemudian ada perubahan dapil akan berpikir kepada next election, lalu katakanlah tidak konsentrasi lagi kepada daerah pemilihan asal itu juga problem. Oleh karena itu hal ini menjadi apa nama catatan penting bagi kami 2 azas. Ini yaitu representasi presiden akuntabilitas. Nanti kita bicarakan pada sesi berikutnya.

Ketua Komisi II : Kan penjelasan dari KPU kemudian ketua Bawaslu, ketua KP negeri, maka kita bisa sampai pada pembahasan. Kesimpulan rapat kita pada sore hari ini dari sore sampai malam, katanya. Ada 5 rancangan kesimpulan nomor 6 Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri komisi pemilihan umum Republik Indonesia Bawaslu, badan pengawas Pemilu Indonesia dan dkpp di Indonesia, bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan dapil untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah, seperti termasuk dalam lampiran 3 dan 4 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang daerah pemilihan. Sedangkan untuk daerah pemilihan DPRD Kabupaten kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama sama.

Mendagri : Kalau izin kalau seandainya kita hanya berdasar undang undang nomor 7 tahun 2017, maka yang 4 DOB itu dapilnya nggak masuk, jadi kami tak saran tambahkan Ya undang undang nomor 17 tentang pemiihan lan umum dan perpu nomor satu tahun tahun 2022

Ketua Komisi II : ya dan perppu satu. Dan koma dan menjadi ya? Gitu ya? Ketua KPU.

KPU : Izin pimpinan. Dan tidak berubah seperti itu, diganti dengan kata sebagaimana.

Ketua Komisi II : Sebagaimana termaktub.

KPU : Ya seperti itu kan seperti itu seperti contoh nanti. Padahal sebagaimana tuh kan itu

Ketua Komisi II : Termaktub dalam lampiran 3 dan 4 undang undang.

KPU : Kemudian yang kalimat terakhir sedangkan nya dihapus langsung aja daerah pemilihan daerah pemilihan DPRD Kabupaten kota akan dibahas lebih lanjut. Nah itu aja, makasih.

Ketua Komisi II : Baik Setuju? Tentang perppunya

Mendagri : Tentangnya tentang perppunya. Ada tentangnya perppunya Tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum. Iya berarti bisa menyangkut sudah 4 DOB

Ketua Komisi II : Setuju. Sudah ya? Oke mana pak yanuar tadi? Udah gitu ya? Enggak sampai satu menit yang poin 6.

Baik bapak ibu sekalian. Ini saya kira rapat komisi 2 yang paling panjang sampai malam. Ini masih lanjut lagi dan ini habis ini lanjut lagi. Iya konsinyering.

Tadi menindaklanjuti poin ke 6 dibahas secara bersama sama.

Baik bapak ibu sekalian dengan tadi kita sudah sampai pada kesimpulan.

Rapat kerja kita pada dari siang sampai malam hari ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kerja kita dan rapat dengar pendapat komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, badan pengawas republik Indonesia dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia. Saya kira kita sama sama tahu yang membuat kita berdebat panjang adalah apabila kalau kita melakukan hal hal yang memang di luar Ya Posisi kita masing masing. Oleh karena itu supaya ini tidak terulang lagi. Ya saya kira ini menjadi Introspeksi buat kita semua pelajaran buat kita semua. Jangan membuat sesuatu yang. menimbulkan kita akan membuat energi makin besar karena energi yang ada saja belum tentu bisa cukup untuk mempersiapkan Pemilu ini akan lebih baik tahun 2024 gitu ya Saya kira itu yang apa namanya bisa kita simpulkan seluruhnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini sebelum saya tutup sampai makasih pada saudara Menteri dalam negeri beserta seluruh jajaran ada pa wakil Menteri dalam negeri, kemudian Ketua KPU dan seluruh komisioner, ada saudara sekjen dan seluruh jajaran kemudian ketua Bawaslu dan seluruh anggota Bawaslu Republik Indonesia beserta jajaran Pak Ketua DKPP dan seluruh anggota DKPP ada mas kris Dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI ucapkan alhamdulillah amin, maka rapat ini saya akan tutup dengan resmi selamat malam. Salam sejahtera wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lampiran II Pedoman Wawancara

Narasumber : Peneliti Perludem

Nama : Heroik Mutaqin Pratama

Tanggal Wawancara :

- 1) Daerah Pemilihan DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan desain daerah pemilihan yang sesuai dengan Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apakah hal ini berpengaruh terhadap demokrasi di Indonesia? Bagaimana pengaruh nya?
- 2) Pada saat Rapat Dengar Pendapat, DPR berkata bahwa urgensi penetapan daerah pemilihan DPR RI ini adalah stabilitas tahapan Pemilihan Umum untuk peserta pemilihan umum yaitu partai politik, menurut perludem bagaimana hal ini?
- 3) Bagaimana pengaruh desain daerah pemilihan DPR RI pada bagaimana nilai-nilai demokrasi dibangun?
- 4) Bagaimana pengaruh desain daerah pemilihan DPR RI pada keadilan pada pemilu tahun 2024?
- 5) Dalam rapat dengar pendapat DPR RI, DPR lebih memprioritaskan peserta pemilihan umum untuk menunjang kestabilan pemilihan umum tahun 2024, bagaimana sistem kelayakan yang ideal menurut perludem?
- 6) Bagaimana pentingnya desain kebijakan daerah pemilihan DPR RI yang ilmiah dan professional menurut perludem?

- 7) Bagaimana distribusi manfaat yang diterima oleh Partai Politik dan beban yang diterima oleh masyarakat dengan ditetapkannya kembali desain daerah pemilihan DPR RI ini?
- 8) Tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI adalah stabilitas waktu pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, bagaimana hal ini menurut perludem?
- 9) Siapakah target dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI ini?
- 10) DPR dalam rapat dengar pendapat berkata bahwa partai politik lebih layak mendapatkan prioritas manfaat dari daerah pemilihan ini, bagaimana hal ini ditanggapi oleh perludem?
- 11) Dalam rapat dengar pendapat, DPR berkata bahwa aturan waktu yang ideal untuk pembahasan dapil ini adalah setelah pemilu 2024, bagaimana perludem memandang hal ini?

Dokumentasi Wawancara

